

USULAN STANDARISASI ISI SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI LANGKAH MENUJU SISTEM INFORMASI NASIONAL

Herlan Puspa Negara¹, Dana Sulisty Kusumo², Yanuar Firdaus A.w.³

¹Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Telkom

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta pemanfaatannya secara luas menuntut Pemerintah untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan mengolah, menyalurkan dan mendistribusikan informasi bagi pelayanan publik. Dalam rangka menghadapi tuntutan tersebut maka Pemerintah mengeluarkan program Sistem Informasi Nasional (SISFONAS) yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi upaya perencanaan, penganggaran dan pengawasan sehingga dapat mewujudkan Pemerintahan yang bersifat Good Governance. Tetapi pada kenyataannya, banyak permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SISFONAS yang diharapkan terwujud pada tahun 2010. Permasalahan tersebut diantaranya terciptanya pulau-pulau informasi, inkonsistensi data dan informasi, sehingga menyulitkan dilakukannya pengintegrasian sistem. Dalam Tugas Akhir ini, dibuat usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan usulan National Framework, yang diharapkan nantinya dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam menjawab permasalahan-permasalahan pengimplementasian SISFONAS. Hasil akhir adalah usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kebutuhan SISFONAS dan usulan National Framework yang membuat pengimplementasian SISFONAS menjadi lebih terarah dan terintegrasi sehingga tumpang tindih pengembangan baik dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat dihindari.

Kata Kunci : SISFONAS, Standarisasi, National Framework.

Abstract

The speedy development and the benefit of information technology extensively required the government to use the development of information technology for developing the skill of processing and distributing information for public service. In confront that demand the government release National Information System programme (SISFONAS) which are expecting can be the solution for planning, calculating and supervising efforts so that can be realize the government with Good Governance character. But in fact, there are so many problems in reaching SISFONAS which expecting can be realize ini 2010. That problem are appearing of information island, data inconsistency and information, that can make the difficulty of integration system. In this paper, be made the proposal of standardization website content of Region Government and National Framework, which expecting can be the suggestion for government solve problems in implementation SISFONAS. The result is the proposal standarization website content of Region Government which suitable with necessity of SISFONAS and the proposal of National Framework which is made the implementation of SISFONAS more resemble and integrate, so that the development overlap in region, Propince and Central Government can be avoid.

Keywords : SISFONAS, Standarisasi, National Framework.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penerapan aplikasi web telah meluas ke berbagai bidang, mulai dari perbankan, asuransi, bisnis, manufaktur, pendidikan dan pemerintahan. Dalam dunia pemerintahan, aplikasi web digunakan dalam banyak hal diantaranya untuk publikasi informasi tentang daerah, potensi investasi, dan berbagai informasi lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak.

Keharusan pembangunan situs web disetiap Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota merupakan tuntutan akan informasi yang cepat dan terupdate setiap waktu, selain itu juga pembangunan tersebut dibuat guna menuju Sistem Informasi Nasional (SISFONAS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Berdasarkan dokumentasi yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi, kondisi Sistem Informasi Nasional kita saat ini yaitu sebagai berikut :

1. Eksisnya pulau-pulau informasi.
2. Sistem keamanan yang tidak memadai dan tidak ada audit.
3. Inkonsistensi data dan informasi.
4. Infrastruktur yang tidak memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, dapat dilihat bahwa begitu banyak permasalahan yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah agar tujuan dari SISFONAS membentuk Pemerintahan yang bersifat *Good Governance* dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dapat terwujud.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2003 yaitu mengeluarkan panduan isi pembangunan situs web Pemerintah Daerah. Tapi sayangnya pembuatan panduan tersebut dibuat dengan cara menganalisis 90 situs Pemerintah Daerah, dimana kondisi pembangunan web Pemerintah Daerah yang saat itu hingga saat ini masih terkesan asal jadi saja. Semestinya Pemerintah dalam membuat standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku, bukan didasarkan dengan cara menganalisa 90 situs yang sebelumnya dibuat dengan inisiatif masing-masing dan terkesan sia-sia. Hal ini diperburuk lagi dengan tidak dijadikannya panduan yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah dan pengembang dalam pembuatan isi situs web Pemerintah Daerah.

Tugas Akhir ini akan membuat standarisasi kebutuhan dari isi minimal situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang seharusnya dan sebaiknya ada pada sebuah web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, karena dalam pembangunan Sistem Informasi Nasional, bukan hanya infrastruktur saja yang diperhatikan tetapi juga infostruktur (content) yang menjadi tujuan utama mengapa Sistem Informasi Nasional diperlukan. Dan Tugas Akhir ini juga akan

membuat usulan *National Framework*, sebagai upaya pembentukan satu kerangka sistem informasi secara nasional.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan yang ada dalam pembangunan SISFONAS :

1. Pembangunan aplikasi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibuat secara sporadis dan dengan inisiatif masing-masing.
2. Eksisnya pulau-pulau informasi, hal ini disebabkan karena institusi pemerintah memiliki kerangka Sistem Informasi yang berdiri sendiri.
3. Terjadinya inkonsistensi data dan informasi yang ditampilkan.
4. Panduan pembangunan isi situs web Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak didasarkan pada Undang-Undang, tetapi dibuat berdasarkan analisis 90 situs daerah yang ada, yang sebelumnya belum memiliki panduan penyusunan dan juga didapat dari jajak pendapat 90 pengelola situs web Pemerintah Daerah.
5. Banyak Pemerintah Daerah dan pengembang situs web Pemerintah Daerah yang tidak mengerti tentang tujuan pembuatan isi web Pemerintahan Daerah sehingga dalam pembuatannya situs web Pemerintah Daerah lebih mengutamakan tampilan dari pada isi sehingga terjadinya inkonsistensi data. Sedangkan isi yang ditampilkan jauh dari perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, sehingga nantinya dapat diintegrasikan secara nasional.

Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini yaitu :

1. Tidak membuat Standarisasi Isi Web Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Tidak melakukan integrasi sistem sebagai bahasan pada usulan National Framework.
3. Situs yang dibuat merupakan web informasi pemerintah Daerah Kabupaten.
4. Situs web Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibuat hanya merupakan wadah untuk menampilkan data-data dari hasil standarisasi isi web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan aplikasi bukan menjadi bahasan dalam skripsi ini. Aplikasi dibuat agar data-data yang ada dapat ditampilkan dan dibandingkan dengan beberapa situs resmi Pemerintah Daerah yang ada saat ini.
5. Dari usulan National Framework yang dibuat, data yang dibangun pada TA ini hanya pada tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten.

1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan TA ini sendiri yaitu :

1. Membuat standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang dan kebutuhan Sistem Informasi, yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan isi situs web Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Membuat implementasi web resmi Pemerintah Daerah dalam hal ini membangun web resmi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat. Implementasi web resmi Pemerintah Daerah Kabupaten ini bertujuan supaya standarisasi yang telah dibuat dapat direalisasikan dengan data yang sebenarnya.
3. Membuat usulan national framework guna menciptakan satu jendela bagi situs-situs pemerintah daerah dan memperlihatkan alur pertukaran data diantara instansi-instansi pemerintahan yang ada guna terciptanya SISFONAS nantinya.

1.4 Metodologi Penyelesaian Masalah

Metode yang digunakan dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah menggunakan metode studi pustaka atau studi literatur dan analisis dengan langkah kerja sebagai berikut :

1. Studi Literatur :
 - a. Pencarian referensi, mencari referensi dan sumber-sumber lain yang layak yang berhubungan dengan TA ini.
 - b. Pendalaman materi, mempelajari dan memahami materi yang berhubungan dengan tugas akhir.
2. Melakukan analisa terhadap standar isi web Pemerintah Daerah yang telah ada.
3. Menganalisa Undang-Undang sebagai landasan kuat guna menunjang isi standarisasi yang akan dibuat.
4. Membuat usulan standarisasi isi web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang dan analisis beberapa situs web Pemerintah Daerah.
5. Membuat usulan nasional framework guna terciptanya satu jendela bagi situs pemerintah daerah dan memperlihatkan alur perpindahan informasi secara global.
6. Melakukan pengumpulan data terhadap isi standarisasi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah dibuat.
7. Membuat implelementasi web resmi pemerintah daerah dengan metode cms (*content management system*) sebagai wadah mempublikasikan data dari isi standarisasi yang telah dibuat sebelumnya.
8. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap usulan standarisasi dan kerangka national framework yang telah dibuat. Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pengguna dan pengelola situs web Pemerintah Daerah. Penilaian akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan tempat penulis melakukan penelitian.
9. Pengambilan kesimpulan dan penyusunan laporan tugas akhir.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan dan dikaitkan dengan tujuan penelitian serta perumusan masalah pada tugas akhir ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan usulan *National Framework* yang dibuat dikatakan **LAYAK** dan **TEPAT** untuk menjadi masukan bagi Pemerintah dan pengembang situs web Pemerintah Daerah, setelah sebelumnya dilakukan kajian penilaian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat melalui Kantor PDE dan ARDA Kabupaten Lahat.
2. Dari hasil perbandingan usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 3 situs terbaik versi The Indonesian ICT Institute yang ada pada Bab 4, disimpulkan bahwa sebagian besar situs tersebut belum memenuhi data-data yang telah diusulkan dalam usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.2 Saran

Setelah memberikan usulan standarisasi isi situs web Pemerintah Daerah dan usulan *National Framework* bagi infrastruktur, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Pusat dalam hal ini DEPKOMINFO segera membuat standarisasi atau panduan isi situs web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota versi 2 atau versi 1.1-nya.
2. Diharapkan pihak-pihak yang terkait langsung dalam penyelenggaraan SISFONAS untuk dapat memfasilitasi usulan yang penulis buat sebagai bahan masukan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan.

Telkom
University

Daftar Pustaka

- [1] BIK dan PDE Kabupaten Kebumen, 2004 , *Sisfonas:Langkah Strategi Menuju Pembangunan Masyarakat Informasi Indonesia*, <http://www.kebumen.go.id>.
- [2] Djumadal, J.Surat, 2005 , *Penerapan E Government dan Berbagai Kendala Di Pemeritahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Bandung ,ITB: Prosiding KNTI dan Komunikasi Indonesia.
- [3] Dean J.Champion. *Basic Statistic For Social Research*.Newyork:Macmilan Publish Ci.Inc.1991.
- [4] Departemen Komunikasi dan Informasi Deputi Bidang Telematika,2002, *Kerangka Konseptual Sisfonas versi 1.0* .
- [5] Departemen Komunikasi dan Informasi.,2002, *Sisfonas 2010: Sisfonas sebagai Tulang Punggung Aplikasi E-Government*.
- [6] Departemen Komunikasi dan Informasi,2003, *Panduan Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah*.
- [7] Departemen Komunikasi dan Informatika, 2003 , *Materi Penyuluhan SIMDK dan Telematika Bidang Hukum Tingkat Daerah*, Jakarta.
- [8] <http://www.bantul.go.id> , didownload pada tanggal 15 Maret 2007.
- [9] <http://www.semarang.go.id> , didownload pada tanggal 15 Maret 2007.
- [10] <http://www.surabaya.go.id>, didownload pada tanggal 15 Maret 2007.
- [11] Kantor PDE dan ARDA Kab.Lahat, 2007, *Kajian Penilaian Atas Skripsi Berjudul "Usulan Standarisasi Isi Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Langkah Menuju SISFONAS"*.
- [12] Redaksi Basimpekab Kutai Timur, 2005 , *Kebijakan dan Strategi Pengembangan E Government*, Kutai Timur , Buletin E Government Kutai Timur.
- [13] Sugiono,2003, *S tatistik Untuk Penelitian*. Alfabeta:Bandung.
- [14] Supriansyah,Haris dan Kartoyo, 2006 , *30 Menit Menjadi Webmaster*, Bandung, OASE Mata Air Makna Gedung Bumi Padjajaran.
- [15] Soendjojo,Hadwi,*Kondisi Situs Web Pemerintah Daerah*, http://www.depkominfo.go.id/?pid=egov&cid=egov_001.
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- [17] The Indonesian ICT Institute. *Peringkat Web Total Pemda Tingkat II*.2007. <http://www.eii-forum.org>